

PELUNCURAN HASIL
INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2023

KORUPSI, DEMOKRASI DAN KEADILAN



Jakarta, 30 Januari 2024



@tiindonesia



@TIIndonesia



Transparency International Indonesia



www.ti.or.id

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX?

Interval pengambilan data medio satu
hingga dua tahun terakhir sampai dengan
Oktober 2023



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX?

13

Sumber data
untuk CPI
2023

12

1
Sumber data
tidak
diperbaharui

Sumber data 2023:

- VDEM
- World Justice Project Rule of Law Index
- PRS Group ICRG indicators
- Economist Intelligence Unit
- World Economic Forum EOS
- Freedom House Nations in Transit
- IMD World Competitiveness Yearbook
- PERC Asia Risk Guide
- Global Insights Country Risk Ratings
- World Bank CPIA
- African Development Bank CPIA
- Bertelsmann Transformation Index

Sumber data sama dengan CPI 2022:

- Bertelsmann Sustainable Governance Indicators

CPI 2023 INDONESIA SOURCE

01

World Justice Project - Rule of Law Index

Pejabat di Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Polisi dan Militer menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi

02

Political and Economic Risk Consultancy

Seberapa parah korupsi di negara tempat beroperasi?

03

Political Risk Service

Korupsi dalam sistem politik. Konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha. Pembayaran ekstra/suap untuk izin ekspor-impor

04

Varieties of Democracy Project

Seberapa signifikan korupsi politik yang terjadi pada cabang kekuasaan; eksekutif, legislatif dan yudikatif?

Bertelsmann Stiftung Transformation Index

Pejabat publik dituntut & dihukum; Keberhasilan Pemerintah memberantas korupsi

05

Economist Intelligence Unit - Country Risk Service

Prosedur yang jelas & akuntabilitas dana publik; Penyalahgunaan sumberdaya publik; profesionalisme penyelenggara negara; Badan audit yang independen

06

IMD World Competitiveness Yearbook

Ada dan tidaknya korupsi dalam sistem politik

07

Global Insight Country Risk Ratings

Risiko individu/perusahaan berhadapan dengan suap atau praktik korupsi lainnya untuk menjalankan bisnis

08

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023 THEME

Global:

- *KORUPSI YANG TIDAK TERKENDALI MENAKIBATKAN LEMAHNYA SISTEM PERADILAN*

Indonesia:

- *KORUPSI, DEMOKRASI DAN KEADILAN SOSIAL*

2016: Social inequality and populism

2017: Shrinking civic space

2018: The crisis of democracy

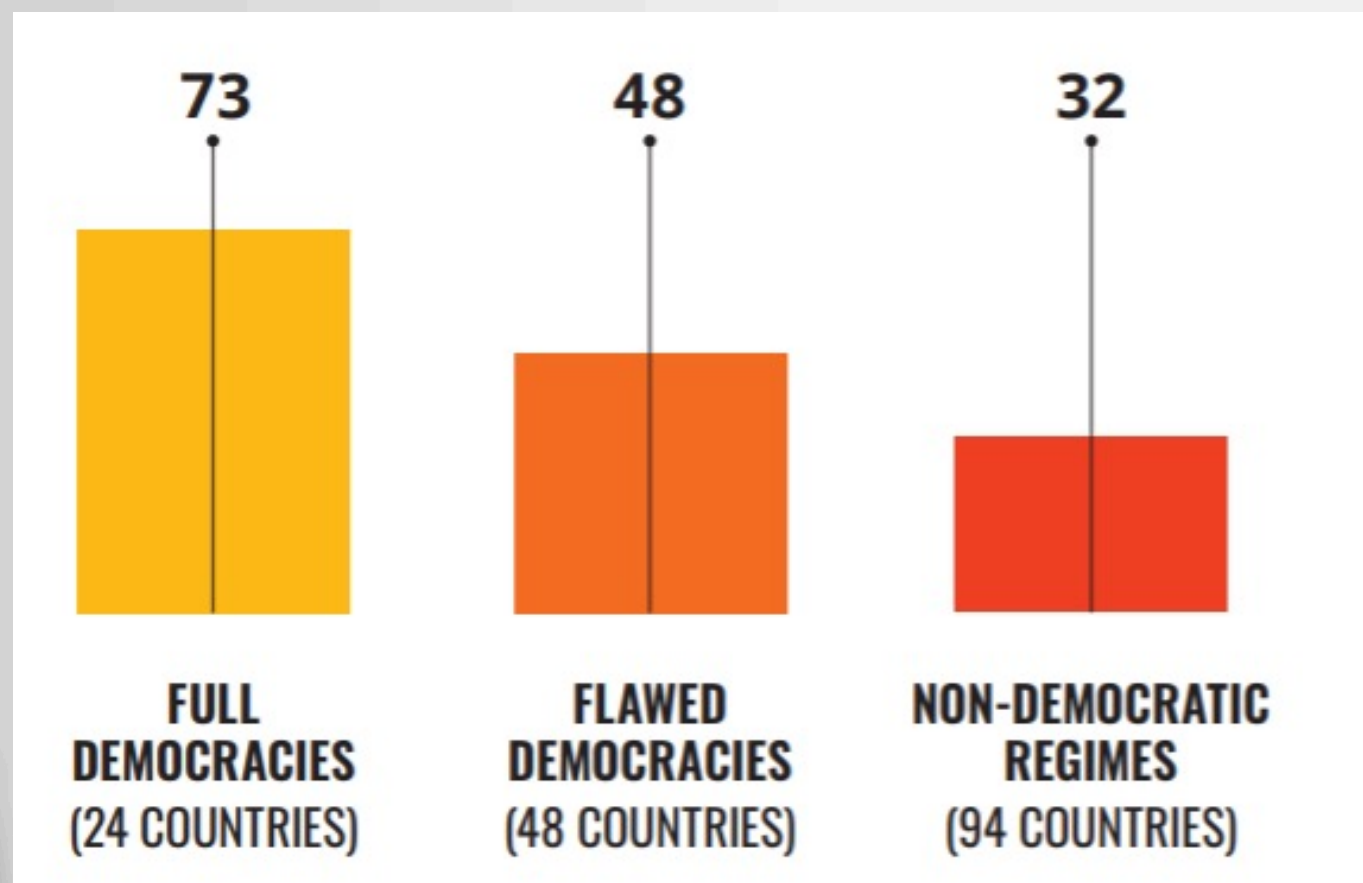
2019: Building political integrity

2020: COVID-19 crisis response

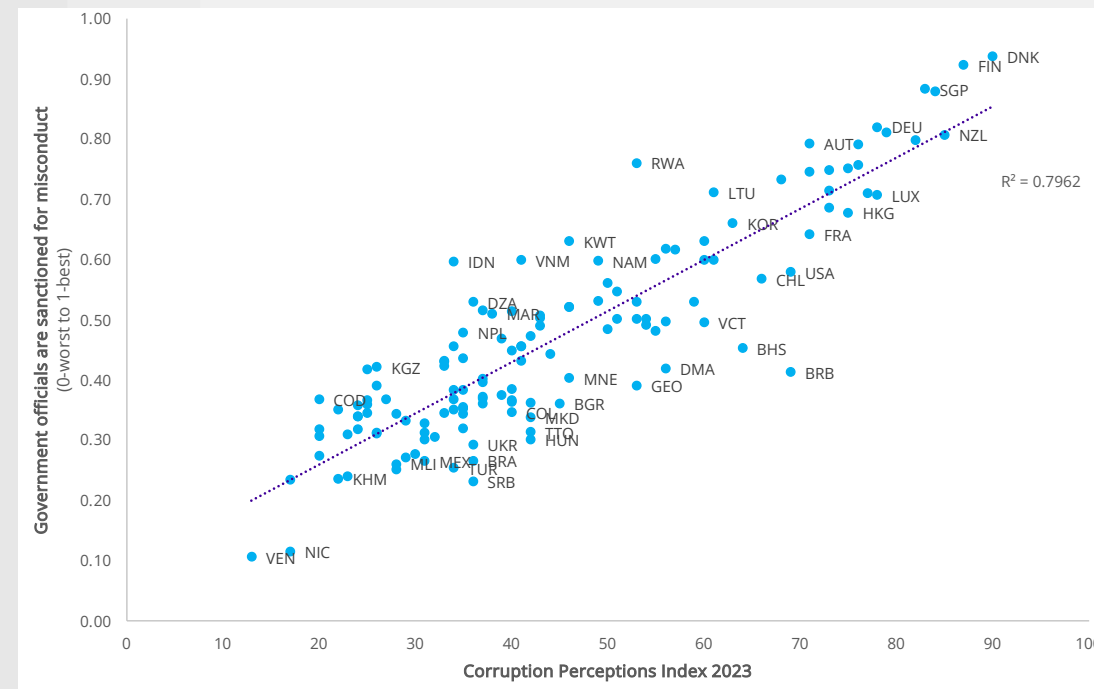
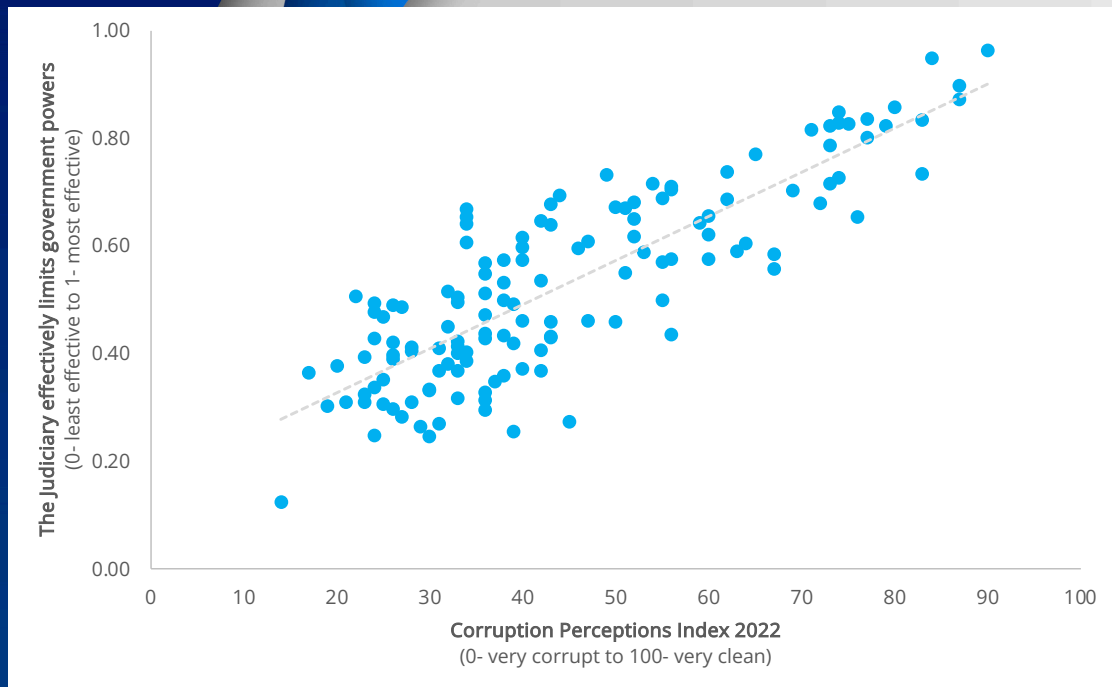
2021: Human rights and democracy

2022: Conflict, peace and security

CPI 2023: RELASI KORUPSI DAN DEMOKRASI



CPI 2023: RELASI KORUPSI DAN KEADILAN



CPI 2023 FACTS AND FINDINGS

GLOBAL



ASIA PACIFIC



The Fact is

43 Average in
8 years

+60% Country
Below 50
120 from 180

180 Surveyed
country
Countries

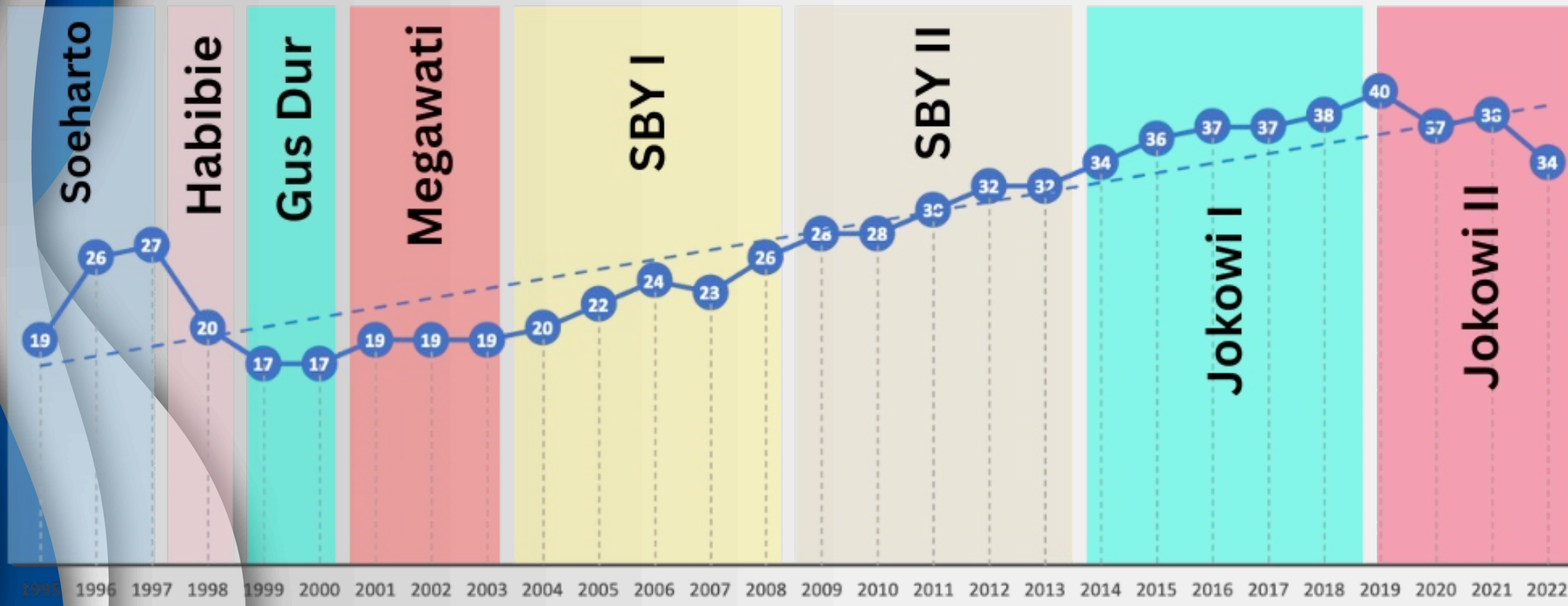
TOP 5 HIGHEST GLOBAL CPI 2023

Score	90	87	85	84	83
					
	Denmark	Finland	New Zealand	Norway	Singapore
Rank	1	2	3	4	5

THE 5 LOWEST GLOBAL CPI 2023



1995-2022 OF CORRUPTION





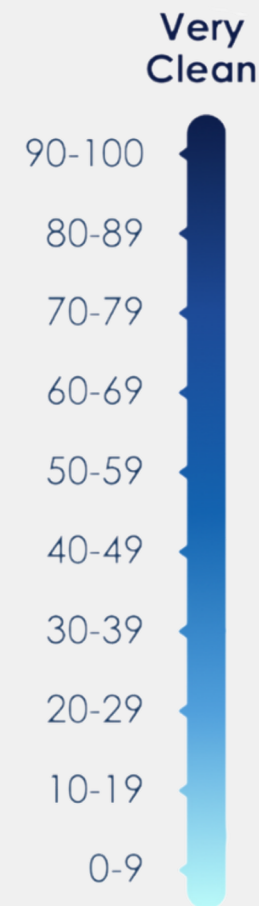
INDONESIA CPI 2023

Score

34

115

Rank



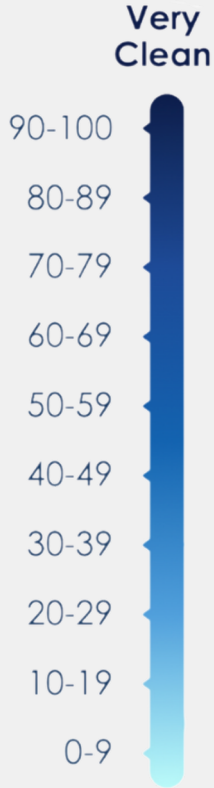
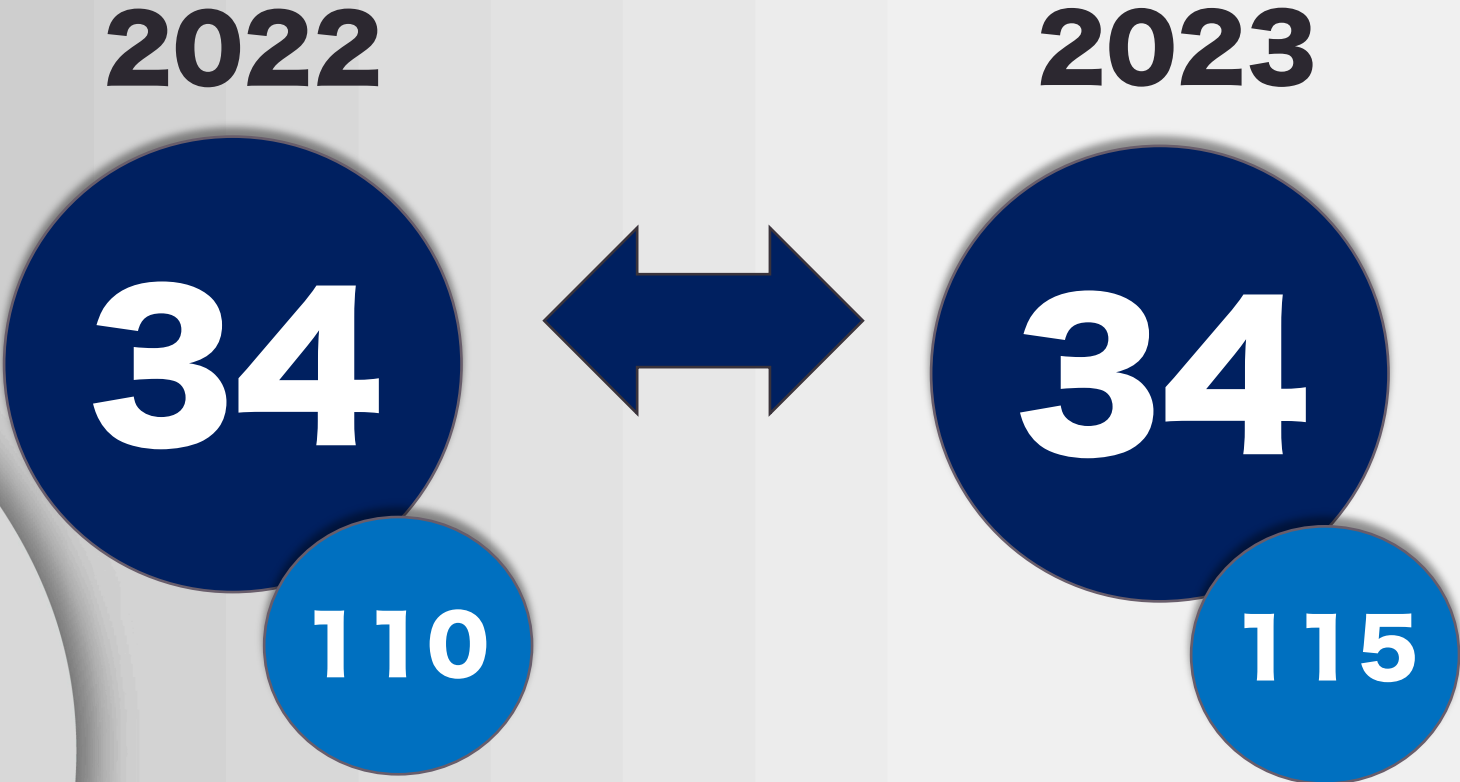
Highly Corrupt

No Data

11

Standard error: 1.8 | Lower CI: 31 | Upper CI: 37

INDONESIA CPI 2022 & 2023



Highly Corrupt

No Data

ASEAN CPI 2023

Country	CPI 2022	CPI 2023
Singapore	83	83
Malaysia	47	50
Timor Leste	42	43
Vietnam	42	41
Thailand	36	35
Indonesia	34	34
Philippines	33	34
Laos	31	28
Cambodia	24	22
Myanmar	23	20

INDONESIA

SOURCE DATA 2023

	2022		2023
Global Insight Country Risk Ratings	47	↔	47
IMD World Competitiveness Yearbook	39	↑	40
Economist Intelligence Unit Country Ratings	37	↔	37
PRS Internasional Country Risk Guide	35	↓	32
Bertelsmann Foundation Transform Index	33	↑	37
PERC Asia Risk Guide	29	↔	29
Varieties of Democracy Project	24	↑	25
World Justice Project - Rule of Law Index	24	↔	24

REKOMENDASI

DEMOKRASI DAN PEMILU

Pemerintah, penyelenggara dan peserta Pemilu wajib menjamin terselenggaranya Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Warga negara berhak mendapatkan kandidat yang berkualitas.



AKSES PADA KEADILAN

Pemerintah dan Badan Peradilan harus independen dan imparsiial dalam penegakan hukum. Negara wajib melindungi hak warga untuk mengakses keadilan dan melawan impunitas serta korupsi.



PEMBERANTASAN KORUPSI

Presiden, Pemerintah, Parlemen dan Lembaga Peradilan harus berkomitmen kuat dan konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi yang berdampak.



TANGGUH
#LAWAN
KORUPSI

TERIMA KASIH



@tiindonesia



@TIIndonesia



Transparency International Indonesia



www.ti.or.id